

ANALISIS KESIAPAN DIGITAL MASYARAKAT DI DESA BANYUBIRU KABUPATEN SEMARANG TERHADAP DIGITALISASI PERDESAAN

Bobby Hasan Fauzan - 14010120140208

Program Studi Ilmu Pemerintahan
Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang kesiapan masyarakat terhadap digitalisasi di Desa Banyubiru Kabupaten Semarang. Seiring dengan perkembangan teknologi digital, penting untuk mengevaluasi sejauh mana masyarakat desa siap untuk mengadopsi dan memanfaatkan teknologi tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kesiapan masyarakat Desa Banyubiru terhadap pemahaman dan penerapan teknologi digital

Penelitian ini menggunakan teori kesiapan komunitas yang dikembangkan oleh Ruth W. Edwards, Pamela Jumper-Thurman, Barbara A. Plested, E.R Oetting, dan Louis Swanson (2000). Metode yang digunakan dalam penelitian ini berupa pendekatan kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Desa Banyubiru terdapat hambatan dalam kesiapan masyarakat terhadap digitalisasi. Hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi mengenai pemahaman aplikasi SuPORT, kurangnya dukungan dari pemerintah baik dalam bentuk program pelatihan maupun penyediaan infrastruktur dan rendahnya sumber daya manusia yang memahami teknologi membuat warga merasa kesulitan untuk belajar dan beradaptasi dengan teknologi baru.

Kata Kunci: Kesiapan masyarakat, Digitalisasi, Teknologi Digital

ABSTRACT

This research discusses the community's readiness for digitalization in Banyubiru Village, Semarang Regency. As digital technology develops, it is important to evaluate the extent to which village communities are ready to adopt and utilize the technology. The purpose of this study is to determine the readiness of the people of Banyubiru Village to understand and apply digital technology

This study uses the theory of community readiness developed by Ruth W. Edwards, Pamela Jumper-Thurman, Barbara A. Plested, E.R Oetting, and Louis Swanson (2000). The method used in this study is in the form of a descriptive qualitative approach with data collection through interviews, documentation, and observation.

The results of the study show that the people of Banyubiru Village have obstacles in community readiness for digitalization. This is due to the lack of socialization regarding the understanding of the SuPORT application, the lack of support from the government both in the form of training programs and the provision of infrastructure and the low level of human resources who understand technology make it difficult for residents to learn and adapt to new technologies.

Keywords: *Community Readiness, Digitalization, Digital Technology*

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Digitalisasi Desa adalah proses transformasi dari konsep konvensional dari kawasan desa menjadi virtual yang meliputi proses transaksi dan penerapan sistem lembaga di dalamnya. Tujuan dari digitalisasi desa ini supaya terjadinya efisiensi kerja, mengurangi penggunaan manusia serta mendapatkan hasil yang lebih banyak dikarenakan cakupannya yang luas.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjelaskan bahwa kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam

dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman desa, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Pembangunan Kawasan Perdesaan merupakan perpaduan antar-Desa dalam satu Kabupaten/Kota. Pembangunan Kawasan Perdesaan ini dilakukan untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pada pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa di Kawasan Perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif.

Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam hal ini memiliki upaya untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan cara

meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, dan memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Dengan kedua hal tersebut diperlukan adanya kepaduan antara digitalisasi desa dengan wilayah desa yang saling terintegrasi. Proses ini tidaklah muda dikarenakan adanya perspektif masyarakat desa dalam nilai tradisional yang belum dibalut dengan teknologi informasi dengan baik. Oleh karena diperlukan adanya pemberdayaan yang tepat bagi masyarakat dari pemerintah untuk mengupayakan masyarakat desa yang melek digital.

Kemandirian dalam membangun desa di tengah perkembangan teknologi yang pesat mempunyai sisi positif. Akan hal itu tidak dapat terjadi dikarenakan kesenjangan digital. Kesenjangan digital juga dapat terjadi akibat tidak siapnya masyarakat dan pemerintah terhadap digital.

Untuk mendalami teknologi diperlukan adanya kesiapan dari masyarakat dalam menangani kesenjangan digital dalam perihal akses, infrastruktur, layanan digital, ekosistem digital, literasi digital yang baik, sehingga dapat

memaksimalkan pemanfaatan digitalisasi di desa dengan sebaik mungkin. Namun, digitalisasi mempunyai beberapa faktor hambatan yang dapat mempengaruhi digitalisasi tersebut, yang pertama ialah sumber daya manusia (SDM), kedua teknologi, ketiga tenaga IT, dan keempat kepemimpinan digital.

Proses tersebut pernah dilakukan oleh salah satu pemerintah Desa di Jawa Tengah, tepatnya di Desa Banyubiru, Kabupaten Semarang. Desa tersebut menjalankan digitalisasi dikarenakan untuk memudahkan masyarakatnya dalam mengurus berbagai macam hal. Desa Banyubiru sendiri telah menjadi percontohnya desa digital dan kerap menjadi studi banding dari desa-desa di Indonesia.

Pada tahun 2019, di bawah naungan Kepala Desa Sri Anggoro Siswaji Desa Banyubiru telah meluncurkan aplikasi *smart village* yaitu “SuPORT”. Aplikasi ini dapat meningkatkan kualitas pada layanan masyarakat bagi warga Desa Banyubiru seperti dalam mengurus dokumen warga tidak perlu untuk bolak-balik datang ke kantor desa, melainkan dapat dilakukan melalui aplikasi tersebut.

Dalam memanfaatkan digitalisasi, layanan digital pun dapat diterapkan di desa melalui aplikasi SuPORT.

Dikarenakan dengan digitalisasi mempermudah akses pelayanan pada kepada masyarakat mengenai informasi yang dibutuhkan dan tentunya banyak manfaatnya.

Pada penelitian ini berfokus pada mengaitkan kondisi ekosistem digital (lingkungan) dengan kesiapan digital pada masyarakat yang terbentuk akibat digitalisasi yang terjadi di kawasan perdesaan. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian yang berfokus kepada Analisis Kesiapan Digital Masyarakat di Desa Banyubiru, Kabupaten Semarang Terhadap Digitalisasi Perdesaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi kesiapan digital serta hambatan pada masyarakat dan mengetahui terkait dengan kondisi lingkungan digital atau ekosistem desa di Desa Banyubiru Kab. Semarang.

Lebih dalamnya, pada penelitian ini mengadopsi Teori Model Kesiapan Komunitas/ CRM (Ruth W. Edwards, Pamela Jumper-Thurman, Barbara A. Plested, E. R. Oetting, and Louis Swanson, 2000) yang memberikan pemahaman yang penting dalam mengevaluasi dan memahami sejauh mana suatu komunitas telah siap menghadapi perubahan, baik dalam ranah sosial, ekonomi, maupun teknologi. Teori ini menekankan lima

faktor utama yang memengaruhi kesiapan masyarakat, di antaranya peran serta dukungan dari pemimpin, struktur organisasi yang jelas dan efektif, komunikasi yang efektif antara berbagai pihak yang terlibat, ketersediaan dan akses terhadap sumber daya yang diperlukan untuk mendukung perubahan, dan dukungan eksternal. Selain itu dalam penelitian ini juga dikorelasikan dengan Teori Difusi Inovasi (Rogers, 2003) yang menjadi kerangka kerja yang penting untuk memahami bagaimana inovasi, khususnya aplikasi *smart village*, diterima dan diadopsi oleh masyarakat. Pada dasarnya, teori difusi inovasi merupakan bagaimana satu inovasi disampaikan melalui saluran komunikasi tertentu sepanjang waktu di antara anggota-anggota sistem sosial. Tujuan dari teori ini yaitu mengadopsinya suatu inovasi yaitu gagasan, ilmu pengetahuan dan teknologi baik itu oleh individu maupun kelompok sosial tertentu.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melakukan penelitian pada obyek yang alamiah, yaitu obyek yang berkembang pada adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti dan kehadiran peneliti tidak mempengaruhi dinamika pada obyek tersebut (Sugiyono,2013).

PEMBAHASAN

1. Tingkat Kesiapan Masyarakat Dalam Menghadapi Digitalisasi di Desa Banyubiru

Perkembangan teknologi telah berkembang sangat cepat, digitalisasi telah menjadi salah satu pendorong utama dalam transformasi digital. Namun, pada penerapannya digitalisasi tidak mudah untuk dilakukan, terutama di wilayah pedesaan seperti Desa Banyubiru. Dengan itu, perlu dipahami terkait kesiapan masyarakat terhadap digitalisasi pedesaan di Desa Banyubiru agar dapat mengidentifikasi bahwa mereka sudah dapat dikatakan siap atau tidak dengan digitalisasi.

Perolehan data dengan narasumber dan data literasi terkait dengan digitalisasi desa Banyubiru, Kabupaten Semarang disajikan dengan adopsi pemikiran Teori Model Kesiapan Komunitas/ CRM (Ruth W. Edwards, Pamela Jumper-Thurman, Barbara A. Plested, E. R. Oetting, and Louis Swanson, 2000) dengan pendekatan peran serta dukungan dari pemimpin, struktur organisasi yang jelas dan efektif, komunikasi yang efektif antara berbagai pihak yang terlibat, ketersediaan dan akses terhadap sumber daya yang diperlukan untuk mendukung perubahan, dan

dukungan eksternal dari pihak luar. seperti pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta, turut berperan dalam memfasilitasi perubahan yang berkelanjutan.

a. Kepemimpinan Kepala Desa Banyubiru Dalam Mempersiapkan Masyarakat Terhadap Digitalisasi di Desa Banyubiru

Kepala Desa Banyubiru memainkan peran penting dalam usaha untuk mengarahkan dan mendorong perangkat desa agar dapat memberikan masukan dan kontribusi guna memperhatikan kesiapan masyarakat terhadap digital. Selain itu, Kepala Desa Banyubiru juga menunjukkan komitmen yang kuat dalam meningkatkan pemahaman digital kepada masyarakatnya.

Pemahaman akan pentingnya digitalisasi tidak hanya sebagai alat untuk meningkatkan efisiensi dan pelayanan publik, tetapi juga sebagai sarana untuk mengubah paradigma dan pola pikir masyarakat terhadap teknologi. Meskipun ada pandangan bahwa teknologi dapat membuat individu menjadi malas, namun kehadiran teknologi digital telah terbukti memberikan manfaat yang menyeluruh baik kepada masyarakat umum maupun kepada perangkat desa tentang keuntungan yang diperoleh melalui digitalisasi. Untuk

mencapai penerimaan yang lebih luas terhadap teknologi digital, pendekatan yang lebih dalam dan menyeluruh diperlukan. Hal ini memerlukan upaya yang berkelanjutan dalam sosialisasi, pendidikan, dan pengenalan teknologi kepada seluruh lapisan masyarakat, terutama yang masih merasa enggan atau kesulitan untuk beradaptasi dengan perubahan teknologi.

Sebenarnya implementasi aplikasi SuPORT, Desa Banyubiru yang menjadi pelopor di antara desa-desa lain di sekitarnya. Meskipun belum ada desa lain yang menjalankan aplikasi serupa, Desa Banyubiru tetap berkomitmen untuk memperkenalkan dan mengintegrasikan teknologi ini sebagai bagian dari pelayanan publik mereka. Implementasi ini menjadi langkah proaktif dari kepemimpinan desa, yang dipimpin oleh Sri Anggoro Siswaji, dalam meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas layanan bagi masyarakat.

Namun, tantangan terbesar yang dihadapi adalah minimnya pemahaman dan kesiapan masyarakat terhadap teknologi digital. Hal ini menunjukkan perlunya upaya yang lebih intensif dalam sosialisasi dan pendidikan kepada warga mengenai manfaat dan cara penggunaan aplikasi SuPORT.

Komitmen kepemimpinan Kepala Desa Banyubiru Sri Anggoro Siswaji dalam mempersiapkan masyarakat dalam menghadapi digitalisasi tercermin dalam dibentuknya Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang bertugas untuk melakukan sosialisasi teknologi digital. KIM berperan sebagai sarana sosialisasi yang dikelola oleh karang taruna, yang bertugas untuk menyampaikan informasi mengenai digitalisasi kepada penduduk desa. Meskipun upaya ini menghadapi tantangan, terutama dalam menjangkau dan mengedukasi masyarakat yang kesulitan beradaptasi dengan hal baru seperti aplikasi digital.

b. Peran Organisasi Dalam Mempersiapkan Masyarakat Terhadap Digitalisasi

Struktur organisasi menjadi sangat penting karena memberikan kerangka kerja yang teratur dan sistematis dalam mengelola berbagai aspek pemerintahan di Desa Banyubiru. Begitu pula, dengan Sri Anggoro Siswaji dalam menjalankan peran organisasinya dibutuhkan visi dan misi agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Pemerintah Desa Banyubiru mempunyai visi dan misi yaitu “Terwujudnya Desa Banyubiru yang Nyaman, Maju,

Demokratis dan Berbudaya berlandaskan nilai-nilai luhur Bangsa Indonesia.

Melalui peran organisasi dan visi-misi Pemerintah Desa Banyubiru, segenap pemangku desa berkomitmen untuk membuat kebijakan dengan melakukan persebaran informasi antara organisasi desa, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya terkait dengan digitalisasi desa dengan berbasis digital.

Strategi kebijakan ini bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh layanan publik. Namun, masyarakat cenderung kurang dapat memanfaatkan dengan baik terkait pemberian fasilitas tersebut.

Pemerintah Desa Banyubiru mengetahui bahwa kebutuhan digitalisasi dapat berubah dan berkembang, yang berarti desa harus terus meningkatkan kemampuan sumber daya manusianya melalui pelatihan dan *workshop* yang sudah disediakan. Namun, upaya-upaya ini belum sepenuhnya berhasil membuat masyarakat memahami dan mengadopsi penggunaan aplikasi yaitu SuPORT dengan baik.

c. Komunikasi Antara Pemerintah Desa Banyubiru Dengan Masyarakat dalam Menghadapi Kesiapan Digitalisasi

Komunikasi yang efektif antara pemerintah desa dan masyarakat

merupakan kunci utama dalam menghadapi tantangan dan peluang digitalisasi. Di Desa Banyubiru upaya untuk mempersiapkan masyarakat dalam memasuki era digital telah menjadi masalah utama. Pemerintah Desa Banyubiru menyadari bahwa untuk mengimplementasikan teknologi digital diperlukan kerja sama yang baik dan komunikasi transparan kepada seluruh lapisan masyarakat.

Proses komunikasi tersebut dapat ditunjukkan dengan adanya penggunaan *website* untuk menampung dan merespons tanggapan serta kritik dari masyarakat. Setiap masukan yang diterima direspons sesuai aturan yang berlaku dan dicatat. Hasil dari catatan tersebut kemudian disampaikan ke masing-masing dusun untuk memberikan informasi mengenai masalah atau konflik yang terjadi di wilayah mereka. Dengan hal tersebut, Pemerintah Desa Banyubiru dapat memperbaiki fasilitas ataupun pelayanan agar mampu menciptakan sesuai dengan keinginan masyarakat.

Di dalam proses komunikasi, pemerintah desa telah melakukan upaya agar masyarakat mengerti tentang digitalisasi. Namun, pada saat peneliti melakukan observasi dengan masyarakat setempat mereka tidak mengetahui tentang

aplikasi digital yang telah disediakan oleh Pemerintah Desa Banyubiru.

Komunikasi dalam kesiapan masyarakat menghadapi digitalisasi belum terlaksana dengan baik. Walaupun, Pemerintah Desa Banyubiru telah memfasilitasi *website* untuk menampung kritik dan saran dari masyarakatnya, hal itu tentu tidak efektif mengingat bahwa kesadaran masyarakat akan digital yang masih minim pengetahuan.

d. Akses dan Sumber Daya Di Desa Banyubiru

Akses yang disediakan dalam menunjang digitalisasi di Desa Banyubiru salah satunya ialah sudah adanya ketersediaan jaringan komunikasi di Desa Banyubiru untuk mempermudah masyarakat dalam mengaksesnya. Inisiatif Pemerintah Desa Banyubiru dalam hal ini telah menyediakan aplikasi SuPORT untuk memudahkan masyarakat pada proses pelayanan administrasi.

Aplikasi tersebut dirancang agar bisa diakses dan digunakan oleh setiap kepala rumah tangga di Desa Banyubiru dengan syarat mereka mempunyai KTP Desa Banyubiru. Namun dalam pengimplementasiannya masih mengalami kesulitan dalam menggunakan aplikasi digital yaitu SuPORT yang tersedia di desa, terutama dalam hal teknis

administrasi yang melibatkan penggunaan aplikasi tersebut.

Penyediaan Sumber daya dalam kesiapan digitalisasi desa juga dilakukan melalui Program Desa Cerdas dari Kementerian Desa dengan dana sebesar 50 juta. Diadakannya program tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesiapan dan literasi digital di masyarakat desa. Sebagian besar dana, yaitu 20 juta, akan digunakan untuk menyelenggarakan *workshop*. *Workshop* ini dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam kepada warga tentang penggunaan aplikasi desa, termasuk SuPORT, serta pemanfaatan teknologi digital. Sementara itu, alokasi dana sebesar 30 juta akan difokuskan pada pengadaan peralatan dan fasilitas tambahan yang mendukung infrastruktur digital di desa. Diharapkan dengan adanya program ini dapat meningkatkan aksesibilitas dan pemanfaatan teknologi digital di Desa Banyubiru, sehingga masyarakat dapat lebih terampil menghadapi era digital yang semakin maju.

e. Keterlibatan Pihak Eksternal dalam Kesiapan Digitalisasi di Desa Banyubiru

Konteks keterlibatan pihak eksternal pada kesiapan digitalisasi masyarakat Desa Banyubiru dapat ditunjukkan dengan adanya peran dari

pemerintah di atasnya dan perusahaan teknologi dalam membantu menyediakan infrastruktur teknologi, pelatihan, pendanaan, dan regulasi. Keterlibatan mereka penting untuk dapat memaksimalkan potensi digitalisasi guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Dukungan pertama adalah dukungan pemerintah Kabupaten Semarang dan Provinsi Jawa Tengah dalam menunjang desa digital. Ketersediaan dukungan dari pemerintah kabupaten dan provinsi untuk inisiatif desa digital masih belum optimal. Pemerintah Kabupaten Semarang saat ini hanya menyediakan parameter atau kriteria penilaian untuk desa digital tanpa memberikan bantuan yang signifikan dalam peningkatan sumber daya manusia (SDM).

Selain itu, anggaran yang disediakan untuk mendukung keberjalanan program ini juga masih sangat terbatas, sehingga upaya untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam hal digitalisasi belum dapat berjalan dengan baik. Namun, kerja sama dengan pihak ketiga telah membantu mengatasi beberapa keterbatasan tersebut.

Tantangan tersebut kemudian dapat dibantu dengan adanya kemunculan swasta membantu mengatasi

keterlambatan ini dengan menyediakan fasilitas antena di dusun-dusun. Meskipun, biaya ditanggung oleh swasta, hal tersebut memungkinkan akses internet sampai ke daerah dusun. Hal tersebut memberikan kesempatan yang sama untuk dapat mengakses teknologi kepada seluruh masyarakat desa. Dibutuhkan kerja sama yang kolaboratif antara pemerintah dan swasta dalam memberikan contoh bagaimana pemerataan akses teknologi dapat dicapai melalui kolaborasi yang efektif.

2. Kondisi Lingkungan Digital Desa Banyu Biru

Desa Banyubiru dengan sebagian besar penduduknya masih bergantung pada sektor pertanian, membuat mereka diharuskan siap dengan perkembangan digitalisasi yang semakin pesat. Kesiapan digital masyarakat merupakan kunci dalam memastikan bahwa mereka dapat memanfaatkan perkembangan teknologi ini secara maksimal. Selain itu, penting juga untuk memperhatikan kondisi lingkungan digital yang berada di Desa Banyubiru.

Kondisi lingkungan digital tidak hanya meliputi infrastruktur saja, seperti akses internet dan sistem telekomunikasi. Namun, lingkungan digital juga mencakup literasi digital masyarakat, dukungan dan

pelatihan yang disediakan, serta penggunaan perangkat digital secara efektif dan perlu juga dipertimbangkan bagaimana hambatan-hambatan yang mempersulit proses digitalisasi seperti keberadaan sekolah yang menjadi proses pembelajaran digital dapat sangat memengaruhi tingkat kesiapan masyarakat dalam menghadapi era digital.

Pada awalnya akses internet di Desa Banyubiru terbatas, namun dengan upaya untuk meningkatkan infrastruktur di Desa Banyubiru kolaborasi antara pihak-pihak yang terkait seperti menggunakan layanan *indihome* dapat berguna hingga sampai dusun-dusun desa. Ini merupakan hal penting karena memastikan bahwa terutama kantor pelayanan desa atau instansi sudah mempunyai akses internet yang memadai untuk berbagai keperluan masyarakat, sehingga meningkatkan produktivitas dan kemampuan dalam menjalankan tugas-tugas mereka.

Ketersediaan perangkat digital seperti komputer dan *smartphone* menjadi faktor penting dalam persiapan menghadapi digitalisasi. Namun, realitasnya menunjukkan bahwa banyak masyarakat masih kesulitan untuk mengakses perangkat digital karena alasan ekonomi yang terbatas. Kepala Desa Banyubiru dalam hal ini sudah membuat

prototype yang dinamakan layanan mandiri dan selebihnya juga ingin menyediakan layanan atau fasilitas-fasilitas ruang publik supaya masyarakat dapat menggunakan dengan semaksimal mungkin, akan tetapi yang menjadi permasalahan ialah faktor keamanannya.

Layanan mandiri ini bertujuan untuk memudahkan akses masyarakat terhadap keperluan administratif dasar seperti KTP dan KK serta mempercepat layanan Pemerintah Desa Banyubiru tanpa harus pergi ke kantor desa yang mungkin jauh dari tempat tinggal mereka. Namun, dapat diketahui juga bahwa tantangan penyediaan fasilitas-fasilitas umum salah satunya adalah masalah keamanan dalam penggunaan teknologi. Tanpa adanya pengawasan yang memadai, dapat terjadi risiko bahwa internet bisa digunakan untuk kegiatan yang berbahaya, terutama oleh anak-anak yang mungkin kurang terkontrol dalam penggunaannya.

Hal ini membuat kekhawatiran terutama Kepala Desa Banyubiru mengenai bagaimana cara melindungi dan mengawasi perilaku dari anak-anak tersebut. Maka dari itu, diharapkan kedepannya jika memang ingin dibuatkan sebuah fasilitas publik atau *prototype* semacam ini nantinya hal tersebut akan menjadi tanggung jawab besar kepada

masing-masing dusun atau balai rakyat di Desa Banyubiru.

Perkembangan teknologi pada masa sekarang telah membawa perubahan besar dalam tata kelola dan layanan di wilayah pedesaan, termasuk di Desa Banyubiru. Dalam menghadapi digitalisasi, kesiapan masyarakat merupakan peran penting untuk dapat beradaptasi dalam menanggapi perubahan tersebut. Aplikasi SuPORT menjadi salah satu infrastruktur melalui pemanfaatan teknologi dalam mendukung sarana untuk mempercepat adaptasi masyarakat terhadap transformasi digital.

Kesiapan masyarakat dalam hal ini, tidak hanya sebatas hal teknis saja, melainkan kesadaran juga menjadikan faktor penting dalam menghadapi digitalisasi pedesaan. Diadakannya aplikasi SuPORT memungkinkan masyarakat untuk belajar cara penggunaan teknologi aplikasi informasi. Hal ini tentu mengingat, internet telah menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam mengakses informasi dan layanan administratif.

Hambatan sosial dan budaya merupakan salah satu tantangan terbesar dalam upaya untuk meningkatkan kesiapan digitalisasi di Desa Banyubiru. Masyarakat

cenderung mempunyai ikatan yang kuat dengan nilai-nilai tradisional sering kali menunjukkan resistensi terhadap perubahan yang telah dibawa oleh teknologi digital. Budaya lokal yang masih melekat pada masyarakat membuat sulit untuk semakin terhubung dengan digitalisasi. Untuk menyelaraskan teknologi dengan budaya lokal, diperlukan pendekatan yang bersifat inklusif dengan melibatkan tokoh masyarakat dan pemimpin desa dalam proses pengenalan dan penerapan teknologi baru. Namun, dalam proses digitalisasi di pedesaan dengan masyarakat mempunyai ikatan yang kuat dengan nilai tradisional dapat memicu ketidaksetujuan atau perselisihan di tengah masyarakat.

Pemerintah desa menyediakan platform komunikasi yang digunakan sebagai sarana interaksi antara pihak yang melakukan pemetaan dengan masyarakat luas. Misalnya seperti penggunaan *Whatsapp* desa, *Youtube* dan *website* digunakan sebagai sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan-keluhan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa ada upaya yang dilakukan untuk memfasilitasi komunikasi dua arah antara pihak yang bertanggung jawab dalam menangani konflik sosial dengan masyarakat yang terkena dampaknya. Tujuan dibuatkan ini

ialah untuk memberikan respons yang relevan atas keluhan-keluhan yang disampaikan oleh masyarakat, sehingga dapat membantu dalam penyelesaian konflik sosial tersebut.

a. Penyampaian Gagasan Dalam Hal Kesiapan Masyarakat Terhadap Digitalisasi di Desa Banyubiru

Penyampaian Gagasan Dalam Hal Kesiapan Masyarakat Terhadap Digitalisasi di Desa Banyubiru dilakukan dengan dapat mengkomunikasikan ide-ide, manfaat, dan strategi dalam menghadapi digitalisasi, serta memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses tersebut.

Kepala Desa Banyubiru dalam hal ini telah berupaya untuk melakukan suatu kegiatan agar masyarakat dapat beradaptasi dengan digitalisasi. Kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam mengadopsi teknologi digital masih terbatas di Desa Banyubiru. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah desa membentuk kelompok informasi masyarakat dan kader digital desa, serta melibatkan organisasi pemuda seperti karang taruna sebagai upaya untuk memberikan informasi, edukasi dan bantuan teknis kepada masyarakat dalam menghadapi digitalisasi.

Kelompok informasi masyarakat berperan sebagai penyebar informasi

terkait dengan digitalisasi salah satunya ialah penggunaan aplikasi SuPORT, serta menjadi jembatan antara pemerintah desa dan warga. Mereka mempunyai tugas untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya teknologi digital dalam berbagai aspek seperti, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

Selain itu, kader digital desa ditugaskan untuk membantu warga dalam memahami dan menggunakan teknologi digital. Mereka memberikan pelatihan dasar tentang penggunaan aplikasi dan internet seperti halnya keterampilan dalam penggunaan aplikasi SuPORT. Dengan langkah-langkah ini diharapkan dapat mempercepat proses digitalisasi di Desa Banyubiru dan memberikan dampak positif yang signifikan.

Dengan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya penggunaan aplikasi SuPORT dapat lebih mudah mengakses layanan publik. Pemerintah desa terus berupaya untuk mendukung agar masyarakat dapat beradaptasi dengan digitalisasi, dengan itu Desa Banyubiru akan menjadi desa yang maju dan adaptif terhadap teknologi.

b. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Masyarakat Desa Banyubiru dalam Kesiapan Digitalisasi

Ilmu Pengetahuan dan teknologi dalam konteks masyarakat Desa Banyubiru memberikan pengertian pada pengetahuan, keterampilan, dan teknologi yang dimiliki dan dimanfaatkan oleh masyarakat desa dalam menghadapi dan memanfaatkan era digitalisasi. Hal ini mencakup pemahaman tentang teknologi dan informasi serta keterampilan dalam menggunakan perangkat dan aplikasi digital. Kesadaran tentang pentingnya teknologi harus ditingkatkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dengan memahami dan memanfaatkan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan baik

Masyarakat Desa Banyubiru dalam memahami konsep dan manfaat digitalisasi dinilai masih sangat kurang untuk dapat mengadopsi penggunaan digital. Tingkat pendidikan masyarakat mempunyai pengaruh terhadap kesadaran akan pentingnya teknologi digital. Mayoritas penduduk Desa Banyubiru memiliki latar belakang pendidikan sampai tingkat SMP. Namun, untuk mengadopsi dan memahami teknologi digital salah satunya penggunaan aplikasi SuPORT, diperlukan dukungan berkelanjutan dari pemerintah desa. Pendekatan ini memungkinkan pemerintah desa untuk memberikan pelatihan yang terarah dan mendalam kepada masyarakat tentang

manfaat serta cara penggunaan aplikasinya. Dengan demikian, diharapkan masyarakat Desa Banyubiru dari kalangan muda hingga menengah ke atas dapat beradaptasi menghadapi perubahan digitalisasi ini.

Selain itu, upaya pemerintah desa dalam memberikan *follow-up* yang berkesinambungan juga menjadi kunci utama dalam memastikan adopsi teknologi digital yaitu SuPORT menjadi sukses. Langkah-langkah konkret seperti penyelenggaraan pelatihan tentang literasi aplikasi digital akan sangat mendukung transformasi digital di tingkat desa. Dengan adanya komitmen yang kuat dari pemerintah desa dan partisipasi aktif masyarakat, diharapkan Desa Banyubiru dapat menghadapi tantangan dan hambatan dari digitalisasi ini.

PENUTUP

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa proses kesiapan masyarakat terhadap digitalisasi desa di Desa Banyubiru belum memenuhi kesiapan yang sebagaimana mestinya. Hal ini didasari atas faktor temuan lapangan pada bab sebelumnya.

Pertama, kapasitas pemimpin Desa Banyubiru telah memberikan

pelaksanaan digitalisasi di desa dengan baik, namun perlu dioptimalkan terkait kebutuhan masyarakat dalam pemahaman digitalisasi yaitu penggunaan aplikasi SuPORT. Kedua, pada organisasi desa kurangnya kesinergian perangkat desa pada sosialisasi yang mendalam kepada masyarakat sehingga terjadi kurangnya pemahaman digital terhadap masyarakat di Desa Banyubiru dan membuat masyarakat cenderung langsung datang ke kantor Desa Banyubiru.

Ketiga, pada komunikasi, walaupun telah diadakan *website* sebagai sarana untuk menyampaikan kritik dan saran, akan tetapi perlu di ingat bahwa masyarakat masih minim pengetahuan untuk dapat menggunakannya sehingga hal tersebut tidak berjalan secara efektif. Keempat, pada keberjalanan akses dan sumber daya, ketersediaan akses tidak diimbangi dengan ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten. Hal tersebut membuat kurangnya pemahaman masyarakat dari kalangan muda hingga kalangan atas belum dapat mengoperasikan aplikasi digital yaitu SuPORT.

Kelima, keterlibatan pihak eksternal dalam hal ini perlu dukungan lebih mendalam dari pemerintah untuk dapat mendorong menjadi desa digital

mulai dari penyediaan pelatihan, pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan.

Dari segi difusi inovasi tentang kesiapan masyarakat terhadap digitalisasi di Desa Banyubiru terdapat juga hambatan yang mempengaruhi kesiapan masyarakat dalam digitalisasi. Hambatan tersebut berupa tidak tercapainya penyampaian gagasan dan tidak tercapainya segi pengetahuan serta teknologi pada pemahaman terhadap digitalisasi desa. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi sosial masyarakat berpendidikan rendah dan kurangnya pro-aktif dari Pemerintah Desa Banyubiru terkait aplikasi digital yaitu SuPORT.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kesiapan digitalisasi masyarakat di Desa Banyubiru Kabupaten Semarang, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan supaya pelaksanaan digitalisasi di desa dapat berjalan dengan lebih baik:

1. Melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat, Banyak masyarakat yang tidak mengetahui adanya aplikasi-aplikasi yang sudah disediakan Pemerintah Desa Banyubiru. Hal ini dikarenakan kurang masifnya informasi kepada masyarakat.

2. Lebih tingkatkan pelatihan dan *workshop* secara khusus dalam membimbing masyarakat agar dapat mengoperasikan teknologi digital, supaya kemampuan mereka dalam mengadopsi teknologi digital salah satunya dalam penggunaan aplikasi desa semakin terbiasa dan terasah serta meningkatkan sistem pelayanan digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji, R. (2016). *Digitalisasi, Era Tantangan Media*. Islamic Communication Journal.
- Ami Afriyani, I. W. (2021). *Penerapan Digital Government di Desa Sukajaya Kabupaten Sumedang Jawa Barat*. *Jurnal Birokrasi & Pemerintahan Daerah*.
- Andreas M. Kaplan, M. H. (2010). *Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media*. Business Horizons, 59-68.
- Badri, M. (2016). Pembangunan Pedesaan Berbasis Teknologi Informasi Dan Komunikasi. *Jurnal RISALAH*, 62-73.
- Bogdan, R., & Biklen, S. 1992. *Qualitative Research for Education*. Boston, MA: Allyn and Bacon
- Dwi Agustin Rahayu, F. A. (2022). Sosialisasi Pengenalan Seni Budaya Lokal Kepada Masyarakat Desa Boyolangu Melalui Digitalisasi Untuk Meningkatkan Nasionalisme. *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia*.
- Hadiyat, Y. (2018). Kesenjangan Digital di Indonesia (Studi Kasus di Kabupaten Wakatobi) *Jurnal Pekommas*, 81-90.
- Inovasi. 2016. Pada KBBI Daring. Diambil 20 Sep 2022, dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/inovasi>
- Menghadapi *Isu-Isu Strategis Terkini Di Era Digital*. 1-9.
- Nana Sutisna, Muhaemin, Aditya Ramadhan. (2022). *Difusi Inovasi Aplikasi*
- Nisrokha. (2020). Difusi Inovasi Dalam Teknologi Pendidikan. *Jurnal Madaniyah*.
- Nur Saidah, L. K. (2022). Analisis Strategi Kesuksesan Kampung Digital Krandegan dalam Mendukung Progam Smart Village. *Journal of Regional and Rural Development Planning*.
- Penerapan Digital Government di Desa Sukajaya Kabupaten Sumedang Jawa Barat. (2021). *Jurnal Birokrasi dan Pemerintahan Daerah*.
- Rizqi Bachtiar, D. L. (2020). Biroraksi Digital: Studi Tentang Partisipasi dan Kesiapan Masyarakat. *Journal of Governance and Social Policy*.
- Rony, Y. (2022, Juni 27). Luncurkan Aplikasi 'Waskidan Smart, Banyubiru jadi Percontohan Desa Digital. Diambil 20 Sep, 2022, dari Suara Merdeka.com
- Ruth W. Edwards, Pamela Jumper-Thurman, Barbara A. Plested, E. R. Oetting, and Louis Swanson. (2000). The Community Readiness Model: Research to Practic. *Journal of Community Psychology*.
- Siputeri dalam Meningkatkan Pelayanan Informasi Publik di Pemerintah Kabupaten Pandeglang . *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan*.
- Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D.
- Peraturan Perundang - undangan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa <https://www.suaramerdeka.com/semarang-raya/pr-043759472/luncurkan-aplikasi-waskidan-smart-banyubiru-jadi-percontohan-desa-digital>.